

# KEPEMIMPINAN PEREMPUAN AKAR RUMPUT

PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN DARI PARA MITRA MAMPU

Anne Lockley dan Gillie Brown

Agustus 2020



---

Publikasi ini diterbitkan dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.



## Menceritakan tentang kepemimpinan perempuan akar rumput

---

Bagi organisasi masyarakat sipil perempuan yang telah terlibat dalam Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang dikenal dengan sebutan (MAMPU),<sup>1</sup> berbagi cerita kepemimpinan perempuan akar rumput merupakan hal penting. Saat ini, kita telah mendengar begitu banyak kisah tentang peran dan pencapaian pemimpin-pemimpin perempuan di tingkat global — yang seringkali terfokus pada kepemimpinan di ranah politik formal atau perempuan yang menduduki posisi manajemen senior di sektor publik maupun swasta. Namun, bagaimana dengan kepemimpinan perempuan di komunitas mereka sendiri—apa bentuknya, bagaimana berkembangnya, dan perubahan apa yang berhasil mereka lakukan? Bagi banyak perempuan, khususnya mereka yang miskin atau karena alasan lain, termarginalkan dari layanan utama, kesempatan, dan pengambilan keputusan, komunitas menjadi tujuan dimana perubahan harus terjadi agar berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari, sehingga kepemimpinan mereka atau rekan mereka menjadi hal utama.

Menurut sejarah, perempuan yang dipandang sebagai pemimpin di tingkat desa, berasal dari kalangan elitis, dan seringkali merupakan istri pejabat desa. Peran utama mereka adalah membantu melaksanakan program dari atas ke bawah (*top-down*), yang umumnya terkait dengan 'peran rumah tangga' perempuan, yaitu sebagai ibu, istri, dan pengasuh. Ada beberapa aspek argumen menyangkut perlunya memperkuat keinginan agar terbentuknya kepemimpinan perempuan yang lebih beragam dan inklusif untuk memecahkan berbagai masalah lokal. Perempuan sebagai manusia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, dan mempengaruhi fokus keputusan-keputusan tersebut. Argumen keberagaman dan efektivitas ini, yang tidak hanya berlaku bagi perempuan, tetapi bagi siapapun yang berada di luar kelompok kepemimpinan yang dominan dan homogen, menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah pemimpin perempuan (yang berasal dari luar kelompok) dapat mendobrak jaringan yang sudah mapan dan tua, dan mengubah tata kelola buruk yang dihasilkan dari adanya sejumlah orang yang memiliki pemikiran sama yang selalu saling sepakat satu sama lain, tanpa ide, diskusi dan analisis baru. Kemudian, kita melihat munculnya beberapa pemimpin

---

<sup>1</sup> MAMPU merupakan Program Kemitraan Pemerintah Australia (DFAT) dan Pemerintah Indonesia (BAPPENAS) yang dilaksanakan sejak tahun 2012 hingga 2020, melibatkan berbagai mitra masyarakat sipil untuk meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan utama dan program pemerintah lainnya dalam upaya pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta mendukung pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Pemerintah Indonesia.

perempuan yang akan mengusung isu perempuan, dan secara aktif mempromosikan kesetaraan gender.

Argumen-argumen ini menjadi semakin relevan, seiring dengan upaya Indonesia untuk semakin mendekatkan lokus pengambilan keputusan dan tanggung jawab alokasi sumber daya publik ke masyarakat; pertama, melalui desentralisasi besar-besaran pada tahun 2000, dilanjutkan dengan pengesahan UU Desa dan pengembangan Dana Desa pada tahun 2014. Struktur tata kelola lokal memungkinkan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa menyusun dan melaksanakan hukum, peraturan dan instruksinya sendiri. Namun, absennya suara perempuan yang kuat dan independen untuk mempengaruhi proses yang berlangsung menyebabkan banyak disahkannya peraturan daerah yang diskriminatif, yang merugikan perempuan dan anak perempuan.

Para mitra awal MAMPU dipilih untuk mewakili berbagai aktor masyarakat sipil yang progresif, yang fokus pada isu gender dan isu perempuan, dengan jangkauan geografis yang luas, basis keanggotaan yang terus bertambah, serta potensi untuk mengangkat upaya di tingkat lokal ke dalam proses penyusunan kebijakan di tingkat nasional.<sup>2</sup> Hal ini dilaksanakan melalui struktur vertikal internal organisasi mereka, melalui submitra, atau menjadi bagian dari suatu koalisi. Pada akhir Program MAMPU, mitra nasional yang awalnya berjumlah tujuh kini menjadi 13. Mereka bekerja dengan lebih dari 100 mitra lokal, di mana mereka banyak melibatkan perempuan yang sebelumnya hampir tidak pernah meninggalkan lingkungan rumahnya. Sebagian mitra juga bekerja dengan perempuan yang telah memiliki pengalaman kepemimpinan dan ditempatkan untuk mengambil peran kepemimpinan yang lebih diakui secara formal, seperti dalam sistem politik dan pemerintahan lokal. Pengalaman para mitra ini mendukung argumen perlunya kepemimpinan perempuan yang lebih kuat dari berbagai latar belakang, yang memiliki dasar pemahaman tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, serta menunjukkan apa yang mungkin terjadi jika ada kepemimpinan yang kuat.

Tulisan ini merupakan bagian dari dokumentasi proyek yang dilaksanakan pada tahun terakhir MAMPU untuk merekam pengalaman dan pembelajaran selama delapan tahun. Tujuannya adalah sebagai rujukan dan inspirasi bagi organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah dan aktor internasional yang mendukung mereka, untuk mengakui dan mengangkat peran berharga para pemimpin perempuan dan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu perempuan dan kesetaraan gender.

Daftar tulisan-tulisan lain dalam rangkaian ini [terlampir](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang para mitra yang ditampilkan dalam publikasi ini, klik [di sini](#).

---

<sup>2</sup> Australian Government. MAMPU Indonesia: *Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan* (Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction) Program Design Document, 2012.



## Suara, pengaruh, dan kepemimpinan

Kepemimpinan didefinisikan dengan cara bervariasi. Sebagian definisi fokus pada karakteristik individu yang dikaitkan dengan kepribadian kharismatik dan kemampuan menduduki posisi tinggi; lainnya fokus pada pencapaian hasil. Tapi, umumnya karena adanya penggunaan pengaruh.<sup>3</sup>

Konseptualisasi kepemimpinan perempuan di dalam MAMPU terus berkembang selama rentang waktu delapan tahun, tetapi, sejak awal, suara dan pengaruh perempuan, termasuk perempuan miskin di berbagai tingkatan dipandang sebagai cara penting untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarganya. Tujuannya adalah memfasilitasi mitra nasional dan lokal, jaringan akar rumputnya, serta anggota parlemen perempuan, antara lain, agar dapat semakin berkontribusi membangun kesadaran dan debat tentang isu-isu terkait; memasukkan isu yang penting bagi perempuan ke dalam agenda kebijakan; dan berkontribusi pada perubahan kebijakan, regulasi, layanan, dan mekanisme bagi perempuan miskin untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah dan desa. Konsep 'suara' di tingkat desa adalah suatu kondisi di mana 'perempuan bekerja secara kolektif dan mengungkapkan pandangan mereka di ranah publik dan privat.'<sup>4</sup> Dari sini, perempuan akan mempengaruhi – mereka mengarahkan keputusan, seperti yang terkait dengan alokasi sumberdaya negara, dengan tujuan memperluas manfaat yang diperoleh. Suara bisa individu maupun kolektif, dan ranah pengaruh bisa kecil maupun besar. Keluaran hasil desain akhirnya dapat diwujudkan, dan bukti bahwa perempuan di akar rumput dapat dan memang mempengaruhi keputusan, semakin meningkat jumlahnya.<sup>5</sup>

Bahkan pada saat berakhirnya MAMPU, jelas bahwa nilai suara dan pengaruh perempuan, yang sesuai pandangan para Mitra MAMPU dan anggota-anggotanya, tidak sepenuhnya instrumental. Jelasnya, pentingnya suara dan pengaruh tergantung bagaimana perempuan memaknai dan melihat manfaatnya bagi mereka, dan tidak hanya dari sisi perubahan yang dapat mereka lakukan. Pengalaman Mitra MAMPU menunjukkan bahwa menduduki posisi tinggi/ senior dalam kepemimpinan formal bisa merupakan sesuatu yang penting, tetapi 'ini bukan soal jumlah (untuk pemimpin formal), kita perlu melatih banyak perempuan. Dari 100 orang, mungkin hanya 5 hingga 10 yang akan mencapai posisi tersebut'.<sup>6</sup> Kenyataannya, kita melihat meluasnya dorongan kolektif dari sistem dan struktur yang telah mapan yang terjadi di berbagai tingkatan.

<sup>3</sup> Domingo P at al. *Women's voice and leadership in decision-making: Assessing the evidence*. London: ODI, 2015.

<sup>4</sup> MAMPU Strategic Plan 2017 - 2020

<sup>5</sup> Hal ini dibahas secara mendalam dalam publikasi MAMPU/University of Melbourne yang akan datang, Diprose R, Savirani A, Setiawan K, dan Francis N. *Women's Collective Action and the Village Law in Indonesia*.

<sup>6</sup> Wawancara, pemimpin PEKKA, Jakarta, Januari 2020.



## Tantangan terhadap kepemimpinan perempuan akar rumput

---

Di tingkat desa, perempuan menghadapi berbagai tantangan untuk memegang peran dalam kepemimpinan formal, dan juga untuk berpartisipasi secara informal, atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Tantangan-tantangan ini meliputi; tereksklusinya mereka dari sistem dan proses pelibatan formal, hingga hambatan yang tidak nyata terlihat, seperti adanya ekspektasi dan norma sosial terhadap mereka. Akibatnya, keterwakilan perempuan pada kepemimpinan formal di tingkat desa masih rendah. Data yang ada di Pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 menunjukkan bahwa dari hampir 75.000 kepala desa dan kecamatan di Indonesia, sedikit kurang dari enam persen adalah perempuan.<sup>7</sup> Meskipun UU Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)<sup>8</sup>, yang menjadi pedoman penyusunan peraturan, mensyaratkan adanya tempat yang dicadangkan bagi perempuan di BPD, sekitar 40 persen desa belum memiliki perwakilan perempuan.<sup>9</sup> Sebuah survei yang dilakukan oleh Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), sebelum menjadi Mitra MAMPU, menemukan bahwa sedikit lebih dari sepertiga responden merasa bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin, dengan alasan utama yang disampaikan oleh tiga perempuan dari mereka yang berpandangan demikian yaitu karena adanya keyakinan bahwa perempuan 'tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan'.<sup>10</sup>

Untuk berpartisipasi di rapat desa seringkali memerlukan undangan. Padahal, warga miskin dan perempuan kecil kemungkinannya untuk diundang ke rapat desa dibandingkan laki-laki atau warga masyarakat yang lebih berada. Kehadiran mereka lebih karena terhambat oleh adanya norma sosial yang membebani mereka dengan tanggung jawab lebih besar untuk mengurus rumah tangga dan keluarga, sehingga mengurangi waktu mereka untuk bisa terlibat. Menurut data survei desa Bank Dunia, antara tahun 2015 dan 2018, rata-rata, sedikit di bawah seperempat peserta rapat desa adalah perempuan.<sup>11</sup> Pelibatan yang berarti membutuhkan aksesibilitas peserta terhadap informasi yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan keputusan, namun perempuan ternyata hanya mengerti sedikit tentang program atau keuangan desa dan cenderung tidak ingin tahu

---

<sup>7</sup> BPS. Statistik Potensi Desa / Village Potential Statistics of Indonesia 2014. Jakarta: BPS, 2014.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Badan Permusyawaratan Desa No. 110/2016.

<sup>9</sup> World Bank. *Indonesian Village Governance under the new Village Law (2015-18): Sentinel Villages Report*. Jakarta: World Bank, 2020.

<sup>10</sup> Community Poverty Monitoring System (Sistem Pemantauan Kemiskinan Berbasis Komunitas, SPKBK). Survei dilakukan kepada 89.960 keluarga (metode sensus) di 111 desa, di 35 kecamatan di 17 provinsi tempat PEKKA bekerja. Pengumpulan data diselesaikan pada tahun 2012.

<sup>11</sup> Syukri, M. Gender Equality in Indonesian New Developmental State: The Case of the New Participatory Village Governance SMERU Working Paper. Jakarta: SMERU, 2019. Diakses dari [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).

mengenai hal ini.<sup>12</sup> Apabila mereka hadir sekalipun, perempuan sering dibuat agar tidak ingin bicara, jika bicara, mereka diejek sebagai pemberontak atau pemicu masalah – hanya sekitar 14 persen dari yang berbicara dalam rapat adalah perempuan.

Sejauh mana aturan dan norma formal dan informal ini menghalangi kepemimpinan dan partisipasi perempuan - dalam konteks kepemimpinan, sangat bervariasi antar kabupaten dan desa. Studi MAMPU mengenai UU Desa<sup>13</sup> menempatkan konteks ini di dalam suatu kontinum: di satu sisi, daerah-daerah di mana partisipasi perempuan sulit biasanya memiliki (jika ada) kebijakan, peraturan, atau program yang lemah dalam mendorong partisipasi perempuan, serta tidak banyak dukungan bagi agenda tersebut. Kekuasaan cenderung terkonsentrasi di kalangan kecil yang mungkin menentang agenda pemberdayaan, khususnya kelompok yang mempertanyakan struktur otoritas status quo. Norma sosial yang kuat juga membatasi pengaruh perempuan di kehidupan publik dan mungkin ada budaya tabu untuk membahas isu-isu yang berdampak pada perempuan. Di sisi lain, lokasi yang sangat kondusif memiliki struktur otoritas yang lebih beragam di tingkat kabupaten dan desa, seringkali termasuk keterwakilan perempuan, dan indikator kebijakan dan dukungan kepemimpinan terhadap pemberdayaan. Ada kecenderungan lebih sedikit pertentangannya, khususnya jika isu prioritas bagi perempuan desa dan agenda advokasi CSO sejalan dengan prioritas politik. Ketika diletakkan pada kontinum ini, kepemimpinan perempuan dan aksi kolektif, termasuk secara informal<sup>14</sup> dari segala konteks, tetapi ketika kondisinya menjadi lebih kondusif, maka ditemukan aktualisasi yang lebih formal dan terlembaga, dan perempuan menjadi tidak terlalu bergantung pada jaringan untuk menerapkan pengaruh mereka.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Darmawan L, Pattinasarany G, and Hoo L. Participation, transparency and accountability in Village Law implementation Baseline Findings from the Sentinel Villages Study. Jakarta: World Bank, 2018.

<sup>13</sup> Diprose et al. (forthcoming)

<sup>14</sup> Hal ini mencakup pelibatan tokoh berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun jaringan, mengintervensi di forum-forum yang mengeksklusi perempuan, serta membentuk ruang informal dan ruang untuk protes bagi perempuan.

<sup>15</sup> Diprose et al. (forthcoming)



## Bagaimana organisasi masyarakat sipil perempuan membangun kepemimpinan perempuan akar rumput?

---

Para mitra MAMPU mengidentifikasi dan melibatkan calon-calon anggotanya dengan berbagai cara, serta melakukan adaptasi terhadap konteks di lapangan. Beberapa mitra sengaja menasar mereka yang miskin secara ekonomi; sebagian lainnya bekerja dengan mereka yang mungkin termarginalkan secara sosial dan politik, namun belum tentu termiskin secara ekonomi (khususnya kelompok yang bekerja di isu pekerja rumahan dan pekerja migran); dan beberapa bekerja dengan perempuan dengan latar belakang elit untuk konteks desa, memanfaatkan pengaruh dan koneksi yang mereka miliki.<sup>16</sup> Perempuan seringkali menerima undangan dari mitra MAMPU atau sub-mitranya, atau terlibat dalam urusan desa melalui koneksi atau ditunjuk, seringkali oleh anggota keluarganya. Beberapa, tetapi lebih sedikit, yang maju atas inisiatif sendiri, dan mereka ini biasanya karena menanggapi isu tertentu dan dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi atau sudah mengenal keadaan diluar. Kecuali kelompok yang disebut terakhir, ketika pertama kali diajak bergabung dalam program Mitra MAMPU, para perempuan tidak melihat diri mereka mampu bersuara, apalagi mempengaruhi, dan yang pasti bukan kepemimpinan.

*Saya takut bergabung dengan PEKKA, karena dulu perempuan dianggap tidak mampu. Dulu perempuan tidak dipercaya, terlebih lagi janda... kami ragu apakah kami bisa diberdayakan dengan bergabung dalam kelompok. Perempuan dulu selalu dipinggirkan, dan kemampuan kami selalu diremehkan. Saya tidak pernah keluar rumah sebelumnya.<sup>17</sup>*

Mitra, termasuk KAPAL Perempuan, PEKKA dan PERMAMPU memiliki pendekatan yang terstruktur dan berbasis modul untuk melibatkan perempuan yang sebelumnya memandang peran dan tempat mereka di masyarakat hanya sebatas di rumah saja. Bagi organisasi-organisasi ini, bekerja dengan perempuan yang paling tereksklusi, miskin, atau termarginalkan mesti dimulai dengan membangun kesadaran dan pemahaman umum tentang peluang dan pilihan perempuan itu dikonstruksi oleh lingkungan sosial mereka. Dengan demikian, perempuan yang dianggap tidak cocok ada di ranah publik bukanlah karakteristik alamiah bawaan sejak lahir, oleh karena itu anggapan ini dapat diubah agar menjadi lebih adil.

---

<sup>16</sup> Migunani. Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia: A study of collective action initiated by partners of the MAMPU program. Yogyakarta: Migunani and MAMPU, 2017.

<sup>17</sup> Kader, Serikat PEKKA Sukerede, wawancara kelompok, Lingsar, Oktober 2016, dalam Migunani, 2017.

Inilah yang disebut oleh KAPAL Perempuan, PEKKA, dan PERMAMPU sebagai kesadaran kritis. Pengembangan kesadaran kritis ini merupakan inti dari kepemimpinan perempuan yang dikembangkan melalui Sekolah Perempuan dari KAPAL Perempuan. 'Kepemimpinan perempuan ini ditandai oleh empat perubahan, yaitu kami memulai dengan membangun kesadaran kritis tentang perspektif gender dan pluralisme. Perubahan selanjutnya adalah membangun komitmen untuk melakukan perubahan yaitu perubahan budaya yang berkeadilan gender. Selanjutnya adalah perubahan politik yang didorong melalui partisipasi dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan di ranah privat dan publik. Seluruh proses ini diproduksi menjadi pengetahuan perempuan dan menjadi sejarah perempuan'.<sup>18</sup> Bagi PEKKA, ini merupakan satu dari empat pilar kerangka pemberdayaan mereka, dan bagi PERMAMPU, kesadaran kritis adalah prasyarat untuk, yang kemudian diintegrasikan dengan, pendidikan politik yang mempersiapkan perempuan akar rumput untuk memasuki ranah kepemimpinan di arena publik. Ini merupakan proses penting yang terus menerus yang membantu perempuan untuk menjawab perubahan cepat dalam kondisi masyarakat, serta mengenali informasi yang menyesatkan.

Tahapan membangun kesadaran kritis ini dimulai dengan mengembangkan pemahaman tentang gender, ketidakadilan gender, dan potensi kepemimpinan perempuan. Kemudian dilakukan penguatan analisis sosial yang menggunakan perspektif gender. Dilanjutkan dengan membangun kemampuan mengembangkan strategi pengorganisasian perempuan dan advokasi. Dalam konteks advokasi, dilakukan penguatan perempuan dalam tata kelola kelembagaan pemerintah kabupaten dan desa. Kapasitas inilah yang akan menjadi basis dalam melakukan advokasi perencanaan dan penganggaran di desa. KAPAL Perempuan dan PEKKA memiliki fokus khusus pada perlindungan sosial dan identitas hukum; PERMAMPU pada kesehatan seksual dan reproduksi, meskipun secara lintas bidang semua saling terkait dengan isu-isu yang meresahkan bagi anggota mereka. Perempuan dilatih berkonsultasi, mengumpulkan informasi, dan kemudian menyampaikan prioritas-prioritas tersebut secara langsung kepada penyedia layanan, atau melalui rapat desa. Memahami identitas sebagai pemimpin merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengembangan kepemimpinan. Dalam proses ini, seseorang dapat lebih yakin menjalankan kepemimpinan, yang kemudian memperoleh dukungan atau penolakan, yang mendorong atau mematahkan semangat untuk meyakinkan diri lebih jauh. Siklus ini membangun (atau justru menghambat) rasa kesadaran diri sebagai pemimpin.<sup>19</sup> Metodologi PEKKA sesuai dengan kebutuhan ini - 'hal terpenting adalah visinya bahwa setiap orang adalah pemimpin—bagi diri mereka sendiri, bagi anak-anak mereka. Kami meminta perempuan untuk pergi dan bertanya kepada orang lain tentang apa arti pemimpin perempuan, atau, kami meminta pemimpin perempuan dari komunitas untuk datang dan mengisahkan cerita mereka tentang

---

<sup>18</sup> Wawancara, pimpinan KAPAL Perempuan, Jakarta, Januari 2020.

<sup>19</sup> Ely R, Ibarra H, and Kolb D. Taking Gender into Account: Theory and Design for Women's Leadership Development Programs, 2011, pp.6-7.

proses terjadinya'.<sup>20</sup> Forum yang dibangun kelompok perempuan akar rumput menjadi strategi penting untuk memperkuat pengembangan identitas kepemimpinan perempuan secara positif, karena di sana mereka mempraktikkan kepemimpinan mereka.<sup>21</sup> Studi tentang UU Desa menunjukkan bahwa dukungan CSO bagi perempuan desa yang rentan dan sering termarginalkan membantu membuka jalan untuk membangun pengaruh dan diperhitungkan dalam pembangunan desa, terutama pada konteks yang sulit dan cukup sulit.<sup>22</sup>

Fokus dasar pada kesetaraan gender dan hak asasi manusia sangat penting. Sebagai seorang perempuan tidak otomatis berarti bahwa sebagai pemimpin mereka memakai focus ini sebagai tujuan. Para Mitra memasukkan pemahaman dasar ini melalui berbagai cara. Sebagai contoh, metodologi untuk kepemimpinan perempuan yang menyorot pekerja rumahan yang dikembangkan Mitra MAMPU yang bergerak di isu ini, diawali dengan sesi tentang karakteristik pemimpin yang baik, dengan penekanan pada inklusi dan kolaborasi (lihat kotak berikut).

## Karakteristik kepemimpinan yang baik

*Inklusif gender:* melibatkan laki-laki dan perempuan untuk bekerja sebagai mitra dalam menentukan dan bekerja untuk mencapai target yang bermanfaat bagi semua pihak

*Komunikatif:* memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan siapa saja

*Fokus pada tujuan:* mampu menjelaskan tujuan kepada semua yang berpartisipasi

*Demokratis dan egaliter:* mampu membuat semua yang terlibat bekerjasama dan dengan saling menghargai

*Sensitif terhadap proses dan pluralis,* menghargai kebutuhan dan ketertarikan pihak lain dalam bekerja untuk mencapai tujuan

*Transformasi,* mampu mengembangkan visi, merumuskan rencana, menginspirasi, memotivasi, memberikan petunjuk dan membangun sebuah tim

*Konsisten* terhadap prinsip atau nilai yang dianut

*Memiliki komitmen,* merasa terikat untuk menunjukkan peran kepemimpinan dengan cara sebaik mungkin.

Dimasukkannya fokus kuat terkait hak, juga penting untuk mengubah kesadaran perempuan tentang posisi mereka di masyarakat. Lasinem, yang sekarang menjadi koordinator divisi pendidikan Sekolah Perempuan di Gresik, Jawa Timur, berbicara tentang bagaimana bangkitnya kesadaran dirinya pada isu perempuan disertai dengan rasa terbebani – tentang beban hidup perempuan, ketimpangan hak sosial, kekerasan, masalah kesehatan dan sebagainya. Pandangannya juga mengalami perubahan, dari yang awalnya menyalahkan perempuan atas apa yang terjadi pada mereka, karena cara berpakaian, tindakan, maupun sikap mereka. Kini ia menjadi

<sup>20</sup> Wawancara, pemimpin PEKKA, Jakarta, Januari 2020.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Diprose et al. (forthcoming)

lebih terbuka dan berempati dengan perempuan lain, dan mempengaruhi mereka agar mengalami perubahan yang sama. Jika sebelumnya perempuan di lingkungannya hanya bergosip ketika bertemu, sekarang mereka mulai membicarakan isu-isu mereka, seperti masalah rumah tangga, kekerasan, dan kesehatan. Ia teringat bagaimana sejak kecil ia diajarkan agar selalu patuh dan jangan "berani" kepada suaminya. Namun, materi yang disampaikan di pelatihan sungguh berbeda. "Saya baru sadar bahwa selama ini saya tidak tahu tentang hak-hak saya."<sup>23</sup>

Untuk informasi lebih lanjut tentang pendekatan terstruktur ini, klik [di sini](#).



## Apa yang terjadi jika kepemimpinan perempuan didorong?

### **Bangkitnya kepercayaan dan keyakinan diri, dan peningkatan pengetahuan**

Studi-studi MAMPU terkait UU Desa (2019-2020) dan Aksi Kolektif (2016-2017) dan proses penelusuran hasil internal MAMPU dalam deskripsinya sejalan dengan apa yang dalam studi UU Desa dijelaskan sebagai sebuah 'perjalanan penuh kejutan, kebingungan, perlawanan, dan perubahan', ketika perempuan menjadi sadar bahwa apa yang sejak kecil mereka yakini tentang peran perempuan dan laki-laki serta status perempuan yang lebih rendah ternyata mungkin tidak benar. Ketika mereka menguji keyakinan baru ini, mereka dapat mengalami ancaman dan intimidasi karena berupaya mengubah tatanan yang sudah ada. Di titik ini sebagian menyerah, sementara sebagian lainnya bertahan.<sup>24</sup> Bagi mereka yang bertahan, terbangunnya percaya diri, keyakinan diri, pengetahuan, dan -seperti pengakuan mereka yang diwawancarai di dalam studi Aksi Kolektif- 'keberanian', adalah awal dari kemajuan yang dapat membantu mereka untuk berbicara dan berpartisipasi atau menyampaikan paparan di hadapan forum komunitas.<sup>25</sup> Perubahan individu

<sup>23</sup> Beech Jones B and Hartoto S (eds.) *Kompendium Perjalanan Hidup Aksi Kolektif Perempuan dan Undang-undang Desa di Indonesia / Compendium of Life Histories: Women's Collective Action and the Village Law in Indonesia*. MAMPU / UniMelb, (forthcoming).

<sup>24</sup> Diprose et al. (forthcoming); Migunani, 2017.

<sup>25</sup> Kerangka pemberdayaan MAMPU menampilkan proses ini dan menyebutkan adanya lima jenis aset: Individu, atau aset manusia, yang mencakup kesehatan dan pendidikan pribadi, keterampilan dan pengetahuan, serta keyakinan dan kepercayaan diri individu; Aset keuangan dan sumber daya, yaitu pendapatan dan tabungan, kemampuan untuk meminjam, mengakses pasar, dan menciptakan *input* produktif seperti alat dan perlengkapan; Aset kemampuan diri, yaitu partisipasi dan pengaruh di keluarga dan masyarakat, akses kepada pekerjaan, layanan, dan program pemerintah yang lebih baik; Aset sosial, termasuk teman, saudara, dan jaringan sosial; serta aset pemungkin (*enabling asset*), seperti akses kepada dokumen administratif atau hukum, perlindungan hukum, dan seterusnya.

adalah prasyarat untuk menciptakan pengaruh, dan dari titik ini, berbagai hasil akan dicapai.

## **Pengungkapan suara dan pengaruh untuk pertama kalinya seringkali melalui penjangkauan dan pendampingan**

Kelompok-kelompok perempuan akar rumput yang dibentuk dan didukung MAMPU cenderung memiliki fokus tematik tertentu, yang biasanya lebih dari satu. Perempuan mulai bersuara dan membangun pengaruh mengenai isu-isu ini.

Sebagai contoh, fokus utama 'Aisyiyah tentang kesehatan reproduksi perempuan, terutama pemeriksaan kanker serviks dini (tes IVA). Isu ini memenuhi kebutuhan perempuan yang memiliki pengetahuan terbatas tentang tubuh mereka dan sering memiliki kekuatiran terpendam. Informasi kesehatan yang disalurkan melalui kegiatan kelompok bisa saja merupakan informasi pertama yang mereka terima, dan biasanya disertai informasi tentang jaminan kesehatan nasional (JKN) dan keberadaan layanan. Akhirnya, menjadi sesuatu yang memungkinkan bagi mereka untuk mengakses layanan reproduksi dan kesehatan lainnya, dan mereka bersemangat untuk membagi informasi ini kepada lainnya. Ibu Reni, anggota Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA)<sup>26</sup>, adalah seorang pedagang sayuran. Ia berbagi pengetahuan dan informasi yang diperolehnya dari kepesertaannya dalam kelompok kepada teman, keluarga, dan pelanggan di pasar. Ia mendorong mereka untuk melakukan pemeriksaan kanker dan menjaga kesehatan mereka sendiri.<sup>27</sup>

Ibu Fitri, seorang anggota Sekolah Perempuan<sup>28</sup>, menggunakan pengalamannya sendiri dalam mengakses layanan kesehatan, ditambah dengan informasi yang diperoleh di Sekolah Perempuan, untuk membantu tetangga-tetangganya untuk belajar dan mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi. Mereka memintanya untuk menemani pemeriksaan di rumah sakit dan mengurus dokumen yang diperlukan.<sup>29</sup> Supiastuti memiliki pengalaman terkait pelibatan masyarakat ketika ia diminta oleh koordinator lapangan PEKKA di tempatnya untuk menjadi tuan rumah suatu acara sosialisasi informasi. Tidak lama kemudian, ia menjadi<sup>30</sup> sekretaris kelompok tersebut dan menghadiri pelatihan kader pengorganisasian komunitas, yang menurutnya, banyak memberikan pengetahuan 'tentang hukum, kesehatan, cara bicara kepada pemimpin, dan bahwa kepala desa dan staf kantor desa sebenarnya adalah pelayan masyarakat'. Masyarakat mulai banyak mendatangnya untuk meminta pertolongan:

---

<sup>26</sup> BSA adalah kelompok perempuan akar rumput 'Aisyiyah yang bergerak dalam suatu struktur vertikal dan sejalan dengan program kebijakan dan prioritas nasional 'Aisyiah.

<sup>27</sup> 'Aisyiyah, A Mobile Vegetable Vendor Who Offers IVA Test, significant change story, 2015

<sup>28</sup> Sekolah Perempuan adalah kelompok belajar perempuan di tingkat desa yang diinisiasi KAPAL Perempuan yang berfokus pada pendidikan kritis dan kesadaran gender di wilayah-wilayah miskin. Program ini dijalankan melalui jaringan mitra lokal KAPAL Perempuan.

<sup>29</sup> KAPAL Perempuan, Fitri Mayangsari, Menolong dengan Pengetahuan dan Pengalaman (Helping with Knowledge and Experience), significant change story, 2019

<sup>30</sup> Kelompok Serikat PEKKA lokal bergerak melalui struktur vertikal berjenjang, dan sebagian besar anggotanya adalah perempuan kepala keluarga.

*'Awalnya saya terkejut, mengapa mereka bisa percaya pada saya? Tapi saya mencoba... dan karena mereka juga sudah percaya pada saya, saya juga siap membantu. Beberapa hal kecil yang telah saya lakukan antara lain membantu mengurus akte lahir, memperoleh SKTM (surat keterangan tidak mampu), dan menemani tetangga untuk berbicara dengan kepala desa'.<sup>31</sup>*

Pengalaman Reni, Fitri dan Supiastuti dalam berbagi informasi dan pengetahuan baru mereka, dan kemudian diminta membantu mengatasi masalah yang mereka hadapi dalam mengakses layanan atau menyelesaikan berbagai urusan dengan birokrasi, merupakan cerita kepemimpinan perempuan yang paling banyak dilaporkan Mitra MAMPU. Kami melihat bahwa informasi yang diberikan melalui inisiatif pemberdayaan perempuan akar rumput terkait langsung dan dibentuk oleh kebutuhan dan kepentingan para perempuan itu sendiri. Dalam beberapa kasus seperti kasus Silma (Boks berikut), menandakan bahwa layanan telah menjangkau orang-orang yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Silma dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menderita skoliosis [tulang punggung bengkok] sejak kecil. Ia menggunakan JKN untuk menjalani fisioterapi untuk mengatasi rasa sakitnya, namun prosesnya sulit dan memakan waktu. Ia melihat bahwa banyak penyandang disabilitas merasa tak mampu bersuara, dan pasrah menerima nasibnya, daripada berusaha mengakses JKN dan layanan yang mereka butuhkan, walaupun seperti katanya, 'Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya minta layanan dan perawatan yang sesuai kebutuhan kami'.

Silma menyelesaikan pelatihan kader dasar melalui Balai Perempuan<sup>32</sup> Kemuning, yang merupakan bagian struktur Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Kemudian ia menjadi fasilitator yang menyebarkan informasi tentang hak kesehatan, termasuk tentang cara mengakses jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui jaringan Balai Perempuan di Sumatera Barat dan Jambi. Ia menerima dan meneruskan pengaduan-pengaduan ke lembaga-lembaga terkait. Ia memperbaiki pengumpulan data penyandang disabilitas yang belum menerima kartu JKN, dan membantu mereka menyelesaikan proses pendaftaran. Sambil melakukan ini, ia menjadi aktivis yang menyuarakan hak penyandang disabilitas untuk diakui, dan untuk hak mereka terhadap informasi dan layanan. Beberapa yang dikenal, sebelumnya bahkan tidak diakui oleh keluarga sendiri karena dianggap sebagai aib keluarga. Mereka tidak memiliki status kependudukan – tidak dimasukkan dalam Kartu Keluarga, menyebabkan sangat sulitnya memperoleh akses terhadap semua layanan.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> PEKKA, Dipercaya dan Membantu Masyarakat Sekitar (Trusted and Helping the Surrounding Communities), significant change story 2015.

<sup>32</sup> Balai Perempuan KPI beroperasi sebagai bagian dari struktur vertikal KPI yang melibatkan perempuan dari berbagai latar belakang. Balai Perempuan memiliki fokus yang kuat pada kepemimpinan perempuan, termasuk untuk bertransisi ke keterwakilan yang lebih formal.

<sup>33</sup> KPI, *Silma Desi, Disability Makes no Barrier to Leadership*, significant change story, 2018.

Pada masa Covid-19, jaringan ini bermanfaat untuk mengatasi permasalahan yang diangkat oleh seluruh Mitra MAMPU tentang kurangnya informasi yang kredibel di tingkat akar rumput tentang pandemi ini. MAMPU telah mengumpulkan banyak contoh dari berbagai mitra yang menunjukkan bagaimana para pemimpin perempuan akar rumput dan kelompok yang mereka bangun bersama telah memanfaatkan hubungan terhadap masyarakat dan kepemimpinan desa untuk mempengaruhi penanganan Covid-19, dan secara cepat mampu menyesuaikan program mereka untuk mengatasi masalah-masalah langsung yang dihadapi di desa mereka<sup>34</sup>.

Untuk melihat contoh bagaimana pemimpin perempuan akar rumput mengatasi Covid-19, klik [di sini](#).

## **Mempengaruhi sistem dan proses yang ada - mewakili kepentingan perempuan dan menyusun kegiatan komunitas**

*Siapa sebenarnya yang harus berjuang bagi perempuan? Kita sendiri, perempuan yang harus berjuang, karena kita yang paling tahu apa yang kita butuhkan.*<sup>35</sup>

Bank Dunia melakukan penelitian di Indonesia yang menyoroti peran dari apa yang mereka sebut sebagai 'aktivis desa'. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang proyek-proyek pemerintah dan dekat hubungannya dengan pejabat pemerintah, tetapi belum tentu merupakan orang berada di desa tersebut. Mereka dikenal sebagai kader Posyandu, kelompok perempuan bentukan pemerintah, dan kelompok petani,<sup>36,37</sup> tetapi jelas konsep ini bisa diperluas mencakup anggota atau kader dari organisasi perempuan non-pemerintah, seperti Mitra MAMPU.

Serupa dengan aktivis desa, pemimpin perempuan akar rumput menyampaikan keluhan sesama mereka terkait kebutuhan prioritas dan masalah di desa. Melalui penjangkauan dan pendampingan yang dijelaskan sebelumnya, pemimpin perempuan akar rumput lebih memahami tantangan yang dihadapi perempuan ketika berinteraksi dengan lembaga. Situasi ini memberikan masukan cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Tambahan keterampilan dan pengetahuan yang mereka peroleh melalui keanggotaan diberbagai kelompok mitra membuat mereka mampu mewakili perspektif-perspektif ini di berbagai forum komunitas yang cenderung dikuasai oleh, atau bahkan seluruhnya, laki-laki.

---

<sup>34</sup> MAMPU. Response to the COVID-19 Pandemic. Cowater, 2020

<sup>35</sup> Risnawati Dethan Sau, lulusan Sekolah Perempuan, Kupang di KAPAL Perempuan [Gender Watch-MAMPU Program](#). Diakses dari <https://kapalperempuan.org>.

<sup>36</sup> AKATIGA. Marginalized Groups in PNPM Rural. PNPM Support Facility: Jakarta, 2010.

<sup>37</sup> Dharmawan L, Pattinasarany G, Hoo L. Participation, transparency and accountability in village law implementation: Baseline Findings from the Sentinel Villages Study October 2015 – February 2016. World Bank: Jakarta, 2018, p.29.

Dengan adanya UU Desa 2014 dan anggaran desa terkait, maka seringkali tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pendanaan bagi berbagai kegiatan perempuan. Keegiatannya beragam, dan dapat termasuk infrastruktur, sosialisasi dan penjangkauan komunitas, pengembangan usaha kecil, dan mendekatkan layanan pada warga yang membutuhkannya.<sup>38</sup>

## **Pemimpin perempuan akar rumput memastikan adanya dukungan bagi kegiatan komunitas yang diusulkan oleh, dan yang fokus pada perempuan**

Nursyamsi, seorang kader 'Aisyiyah di Bantaeng, Sulawesi Selatan, melakukan advokasi peraturan desa terkait Covid-19. Ia bekerja dengan sekelompok kader lain untuk membuat masker untuk dibagikan kepada seluruh warga di desanya, dan mendorong adanya anggaran dana desa untuk membeli bahannya. Pembagian diutamakan untuk warga lanjut usia dan mereka yang tidak bisa tinggal di rumah, seperti pengemudi yang harus bekerja. Mereka membentuk tim relawan dan sebuah posko yang menyediakan informasi dan masker bagi yang membutuhkan, dan mencatat informasi tentang warga yang memerlukan bantuan akibat goncangan pandemi ini.<sup>39</sup>

Agustina, kepala kelompok konstituen BaKTI Buntu Kandora<sup>40</sup> berkoordinasi dengan Pemerintah Lembang untuk memperoleh dukungan untuk mengadakan pelatihan vokasi bagi perempuan, termasuk penggunaan tempat pelatihan dan sedikit anggaran (Rp10 juta pada tahun 2017 dan Rp15 juta pada tahun 2018). Berbekal pengalaman pribadi di bidang kerajinan, ia melatih dan menjadi mentor bagi kelompok perempuan dan berhasil membentuk kelompok pengrajin. Ia telah mengembangkan sistem pemasaran melalui inisiatif BUMDes. Pesan-pesan tentang pemberdayaan perempuan dan anak, dan hak untuk terbebas dari kekerasan menjadi muatan pelatihan tersebut.<sup>41</sup>

Semua Mitra MAMPU mengadvokasi peningkatan keterwakilan suara dan kepentingan perempuan dalam proses perencanaan dan penganggaran desa. Salah seorang lulusan Sekolah Perempuan, Risna, melobi pemerintah desanya untuk menerbitkan dan melaksanakan peraturan desa tentang partisipasi perempuan, yang menetapkan kuota 30 persen dalam perencanaan, pembangunan dan monitoring. Desa tersebut rutin menggelar pertemuan

---

<sup>38</sup> Para Mitra MAMPU memiliki berbagai pengalaman dalam mengakses anggaran pemerintah daerah untuk meningkatkan akses kepada identitas hukum dan perlindungan sosial. Lihat Lockley A, Lakshmi T, and Satriana S Comprehensive, transformative, inclusive, and gender responsive social protection: the experience of MAMPU partners and its relevance to the COVID-19 context, MAMPU Jakarta, 2020.

<sup>39</sup> 'Aisyiyah. *Cadre MAMPU Advocates for Village Fund Budget for Covid-19*, significant change story, 2020.

<sup>40</sup> Kelompok konstituen BaKTI bertujuan menghubungkan perwakilan politik seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan masyarakat yang mereka wakili. Warga dapat menyuarakan isu-isu yang menjadi kepentingan mereka serta prioritas pembangunan kepada para perwakilan dan birokrat untuk dipertimbangkan di dalam perencanaan pembangunan.

<sup>41</sup> BaKTI. *Agustina, agen perubahan perempuan*, cerita perubahan signifikan, 2019.

musrenbang, dan sikap kepemimpinan Risna berhasil membuatnya terpilih menjadi ketua RT.<sup>42</sup>

Selain mempengaruhi anggaran desa, dari tahun 2015 hingga Maret 2020, para perempuan akar rumput, yang terhubung melalui berbagai jaringan dan organisasi berbasis komunitas, yang diperkuat Mitra MAMPU, mempengaruhi penyusunan lebih dari 400 kebijakan dari peraturan desa hingga peraturan tingkat nasional yang terkait kegiatan organisasi perempuan di tingkat komunitas, atau menjadikan partisipasi perempuan dalam diskusi dan proses pembantuan keputusan.

Temuan utama dari studi MAMPU tentang UU Desa adalah bahwa aturan-aturan – seperti peraturan, kebijakan dan pedoman pelaksanaan teknis tingkat desa dan kabupaten, merupakan insentif yang penting dan diperlukan untuk para aktor yang menentang untuk melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan untuk memprioritaskan alokasi pendanaan yang diusulkan perempuan. Jika bekerja sendiri, mereka tidak akan memperoleh hasil. Pengaruh perempuan kurang terlihat di lokasi-lokasi kontrol studi, di mana mitra OMS tidak aktif, dan perempuan tidak menerapkan kepemimpinan kolektif mereka.

## **Kepemimpinan formal**

Pergeseran pengalaman perempuan dari bentuk kepemimpinan cara informal – dengan membantu perempuan lain, mewakili kepentingan mereka, dan mempengaruhi sistem yang ada – ke posisi kepemimpinan formal sangat beragam. Di tingkat informal, perempuan jelas tidak mengganti pola kepemimpinan yang ada, namun memperluas dan meningkatkan apa yang telah ada.<sup>43</sup> Ketika harus mengisi posisi yang selama ini hampir selalu diduduki laki-laki, selalu ada berbagai hambatan. Walaupun demikian, perempuan memang bertransisi dari yang awalnya aktif dan seringkali menjadi pemimpin di kelompok berbasis komunitas, ke peran lain, sehingga kredensial dan profil kepemimpinan mereka terbentuk. Kesuksesan ditemukan pada perempuan yang dipilih menjadi ketua RT/RW, sebagian kecil juga telah bergabung menjadi aparat desa tingkat tinggi, sementara beberapa lainnya bahkan telah menjadi kepala desa.

BaKTI, KPI, PEKKA dan PERMAMPU semuanya memiliki inisiatif yang ditujukan untuk mempersiapkan perempuan menduduki kepemimpinan formal, atau meningkatkan pengetahuan dan membuka wawasan gender dari pemimpin yang ada. Menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, PERMAMPU menyelenggarakan program pendidikan politik yang bertujuan meningkatkan jumlah kandidat perempuan untuk menempati posisi-posisi strategis di pemerintah daerah atau di lembaga adat dan keagamaan. Program ini meliputi topik seputar isu hak, memperkenalkan peserta pada analisis gender sederhana, dan mendiskusikan strategi advokasi dan pengorganisasian bagi perempuan untuk membangun

---

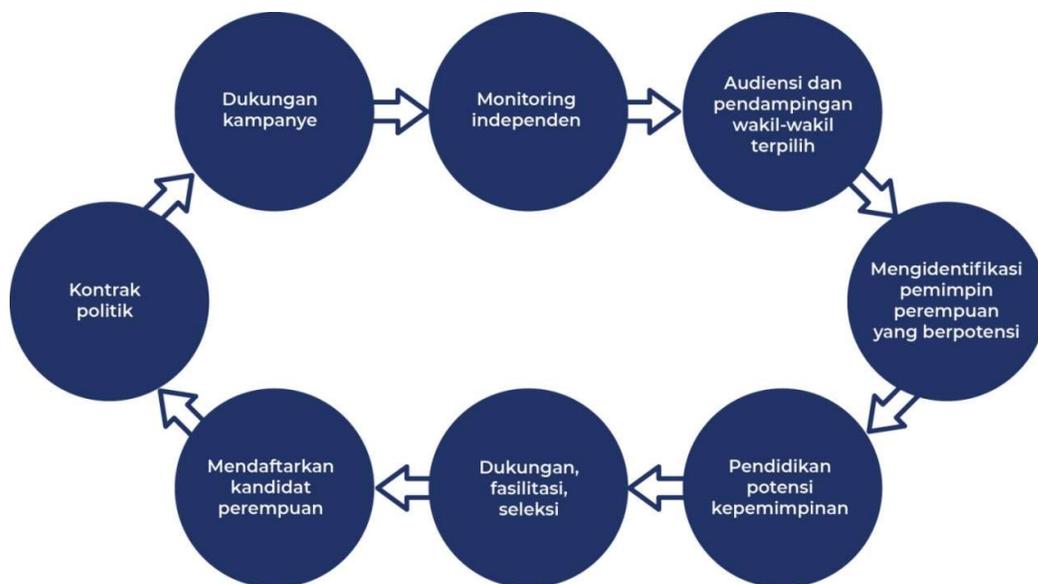
<sup>42</sup> KAPAL Perempuan Gender Watch-MAMPU Program. Diakses dari <http://kapalperempuan.org/wp-content/uploads/2020/02/eng-profil-kapal-gw-mampu-leader-final.pdf>

<sup>43</sup> Wawancara, pemimpin PEKKA, Januari 2020, Jakarta.

kekuatan kolektif, setelah menyelesaikan proses yang dirangkum pada Gambar 1. Tujuannya adalah agar para lulusan program ini memiliki keterampilan untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingan perempuan, khususnya yang termarginalkan dan secara historis belum terwakili.

Program ini dimulai dengan menasar anggota kelompok saja, tetapi kemudian mencakup jaringan yang lebih luas, yang meliputi perempuan yang memiliki potensi dan minat menjadi pemimpin di ranah publik. Sebagian meminta dukungan dari PERMAMPU, lainnya didekati oleh PERMAMPU. Sekitar 800 perempuan yang tercatat oleh seluruh anggota konsorsium PERMAMPU berpartisipasi dalam program ini.

**Gambar 1** Program pendidikan calon pemimpin perempuan PERMAMPU



Sembilan dari 66 kandidat perempuan di wilayah ini berhasil; banyak lainnya terlibat dalam proses pilkada, termasuk sebagai pengawas. Analisis PERMAMPU tentang rendahnya jumlah pencalonan akhir, dan tingkat keberhasilan menunjukkan adanya berbagai faktor penyebab. Kandidat perempuan seringkali tidak memiliki dana cukup untuk berkampanye, dan juga tidak terlibat dalam 'politik uang' - yaitu membeli suara pemilih. Seringkali, mereka kurang dikenal, kurangnya koneksi keluarga dan personal untuk menggalang dukungan, dan tidak didukung tim sukses. Ada pula pandangan agama dan norma sosial yang dipatuhi yang membuat pemilih tidak memilih calon perempuan sebagai anggota legislatif.

Namun, kegiatan ini menunjukkan adanya pemimpin perempuan – baik yang berasal dari jaringan kader atau memiliki riwayat sebagai pejabat publik, yang siap menempati peran strategis, dari desa hingga ke tingkat provinsi. Para perempuan akar rumput telah terlibat dalam advokasi kebijakan yang menasar pemerintah.

Selain itu, dari perempuan yang sukses, ada indikasi bahwa koneksi dan dukungan dari jaringan yang dibentuk melalui komunitas mereka, cukup membantu.<sup>44</sup>

Untuk contoh tentang perempuan yang telah masuk ke peran kepemimpinan formal, klik [di sini](#).



## Beberapa pembelajaran kunci

---

### **Kepemimpinan perempuan akar rumput bersifat menyebar, bukan secara linear**

Meskipun penempatan suara dan pengaruh perempuan dalam hierarki keluaran (*outcome*) MAMPU awal telah ada, namun kenyataan bahkan hanya sedikit linear dari yang diperkirakan. Para perempuan akar rumput mulai menguji kepemimpinan mereka di dekat rumah, kadang dengan mulai bicara, dengan menyebarkan informasi dan pengetahuan, dan dengan menggunakan pemahaman mereka yang lebih baik tentang cara membantu teman, keluarga, dan tetangga mereka untuk mengakses layanan dan berurusan dengan birokrasi. Bagi sebagian orang, hanya sampai di sini saja, dan Mitra MAMPU berupaya membangun dan menghubungkan jaringan dukungan ini. Perempuan akar rumput lainnya melangkah lebih jauh dari lingkungan rumah mereka dan berusaha mengubah kebiasaan yang ada, baik dengan cara lebih masuk ke dalam dengan mengambil peran kepemimpinan formal, atau dengan menyampaikan contoh yang sedemikian baik kepada aliansi sehingga mereka mendengarkannya. Perubahan seringkali lebih didorong dari berbagai arah oleh perempuan yang berkecimpung di gerakan, dan bukan dihasilkan oleh kekuasaan, kharisma, atau popularitas seseorang saja. Keterkaitan antara kepemimpinan perempuan yang muncul dengan konteks dimana hal itu terjadi merupakan hal kunci dari proses ini. Kepemimpinan tidak berkembang dengan cara yang dapat diprediksi.

### **Pengalaman yang dijalani merupakan motivator penting, dan sumber informasi**

Kepemimpinan perempuan akar rumput seringkali dimulai dengan melayani - yaitu membantu orang lain dengan mendampingi atau memberikan informasi. Perempuan memanfaatkan pengalaman mereka untuk menyuarakan isu mewakili lainnya dalam forum-forum komunitas, kabupaten, dan kecamatan, dan bagi mereka yang melanjutkan ke peran formal, baik di desa dengan struktur tata

---

<sup>44</sup> PERMAMPU 'Geliat Perempuan Sumatera' Sebuah Pengalaman Pusat Pendidikan Perempuan Potensial untuk Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput. Draft, 2019.

kelola dusun, dalam institusi keagamaan atau adat, atau dalam masyarakat sipil. Perempuan seringkali mengurus isu-isu yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu mereka sangat sensitif, dan berada di posisi yang sangat responsif terhadap perubahan situasi, seperti halnya pada masa epidemi Covid-19 ini.

## **Program-program terstruktur dengan fokus hak asasi manusia, sangat relevan bagi perempuan yang hanya sedikit mengenal dunia luar**

Menyadari hak perempuan untuk terlibat langsung dengan apa yang terjadi di dunia mereka penting bagi perempuan untuk memahami legitimasi mereka sebagai pemimpin. Latar belakang perempuan akar rumput yang tereksklusi, berpendidikan rendah, dan sering dipatahkan semangatnya, merupakan hal penting yang perlu diakui, meskipun sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa diatasi. Pengalaman Mitra MAMPU menunjukkan bahwa pemimpin dapat berasal dari mana saja.

## **OMS yang fokus pada perempuan dan kesetaraan gender sangat dibutuhkan untuk membantu menciptakan ruang ini, dan memperkuat keyakinan akan berkembangnya kepemimpinan perempuan akar rumput**

OMS perlu menyesuaikan pendekatan mereka sesuai konteks tempat mereka bekerja, meskipun dalam konteks paling sulit dan menantang sekalipun mereka mengalami kemajuan sepanjang waktu dalam membangun kepemimpinan. Dalam konteks yang paling sulit pasti membutuhkan waktu lebih lama dan upaya yang lebih intensif, dengan kemajuan yang lebih lambat. Bahwasanya konteksnya kondusif atau tidak, OMS perempuan menciptakan ruang dan lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk terlibat.

Tulisan ini menelusuri secara sangat singkat, pengalaman yang sangat kaya, dan beberapa contoh kesuksesan yang dihasilkan. Publikasi MAMPU lainnya, khususnya yang dirujuk disini, terdapat uraian rinci. Para penulis mengakui adanya kerja, eksperimen, dan pembelajaran yang luar biasa, dan berterima kasih kepada para Mitra MAMPU atas masukannya pada tulisan ini, khususnya melalui *monitoring* dan pencatatan kemajuan yang terus mereka lakukan dalam usaha mereka mendukung perempuan agar dapat mengakui diri mereka sebagai pemimpin, serta mewujudkannya dengan cara-cara yang penting bagi mereka.

---

**Contoh dan informasi lebih lanjut  
mengenai kepemimpinan  
perempuan akar rumput dan kerja  
mitra MAMPU**



## Tiga program pengembangan kepemimpinan perempuan

<b>PERMAMPU</b> <b>(Pusat Pembelajaran Perempuan Potensial)</b>	<b>PEKKA</b> <b>(Kurikulum Kepemimpinan Perempuan)</b>	<b>KAPAL Perempuan</b> <b>(Sekolah Perempuan)</b>
	Orientasi	
Analisis gender dan feminis <ul style="list-style-type: none"> <li>– Memahami jenis kelamin, gender, dan seksualitas</li> <li>– Bentuk ketidakadilan gender</li> <li>– Kerangka teoretis dan kegiatan untuk memperkuat perempuan</li> <li>– Memperkuat ekonomi sebagai titik masuk</li> </ul>	Modul 2: Memahami kehidupan perempuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Perjalanan hidup perempuan</li> <li>– Perempuan dan ketidakadilan</li> <li>– Perempuan dan impian hidupnya</li> </ul>	Modul 1: Persiapan sosial Memetakan isu-isu sosial dan potensi kepemimpinan perempuan sebagai cara untuk mengintegrasikan strategi pendidikan dengan organisasi komunitas
Dasar hukum hak asasi manusia dan hak perempuan, termasuk CEDAW	Modul 3: Perempuan kepala rumah tangga: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tiga dimensi kekuasaan</li> <li>– Visi dan misi pemberdayaan PEKKA</li> </ul>	Modul 2. Gender Memahami konsep gender, bentuk dan penyebab ketidakadilan gender, dan strategi kesetaraan gender
Hak dan keterwakilan politik perempuan <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kepemimpinan perempuan</li> <li>– Hak politik perempuan</li> <li>– Pengaruh agama dan budaya</li> <li>– Sistem politik Indonesia</li> </ul>	Modul 4. Kepemimpinan perempuan: Mengetahui pemimpin perempuan Komunikasi kepemimpinan	Modul 3. Pluralisme Sebagai sebuah nilai penting dalam memperjuangkan keadilan sosial dan gender di Indonesia
Hak kesehatan seksual dan reproduksi (acuan: definisi WHO dan ICPD)	Modul 5: Pandangan nasional tentang penguatan perempuan Menerjemahkan nilai-nilai nasional ke kehidupan sehari-hari demi persatuan, harmoni, dan keadilan bagi seluruh masyarakat	Modul 4. Perlindungan sosial Khususnya terkait dengan pengurangan kemiskinan
Advokasi dan organisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>– Membangun aksi kolektif</li> </ul>	Modul 5: PEKKA dan perlindungan sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>– Analisis sosial</li> <li>– <i>Monitoring</i> program-program perlindungan sosial berbasis komunitas</li> <li>– Membangun forum-forum multi-pemangku kepentingan untuk perlindungan sosial</li> </ul>	Modul 5. Pengembangan keorganisasian dan penguatan kepemimpinan perempuan
Analisis produk hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kebijakan responsif gender, rencana aksi gender</li> <li>– Memahami anggaran</li> <li>– Undang-undang Desa</li> </ul>	Modul 7: Advokasi Memahami advokasi Analisis aktor	Modul 6. Penguatan <i>livelihood</i> perempuan (sumber-sumber penghidupan perempuan)
Komunikasi dan artikulasi prioritas perempuan <ul style="list-style-type: none"> <li>– Komunikasi asertif</li> <li>– <i>Public speaking</i> (bicara di depan umum)</li> <li>– Menulis ide</li> <li>– Membangun dukungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Menggunakan alat/ <i>tool</i> kampanye</li> </ul> </li> </ul>	Modul 8: Pengembangan keorganisasian <ul style="list-style-type: none"> <li>– Membangun organisasi yang efektif</li> <li>– Mengelola organisasi, peraturan, dan mengembangkan koperasi/kelompok simpan pinjam PEKKA</li> </ul>	Modul 7. Pengembangan advokasi berbasis data yang responsif gender dan data inklusif
<i>Monitoring</i> dan evaluasi	Modul 9: Pelaporan dan dokumentasi	



## Perjalanan kepemimpinan: dari tereksklusi, hingga menjadi bagian dari penggerak sistem

### **Saraiyah, perempuan pertama yang bergabung di Majelis Krama Desa (MKD)**

Saraiyah awalnya merasa bingung dengan ide Sekolah Perempuan, membayangkan apa yang mereka harapkan dari kita, 'perempuan tua dan miskin'. Namun ternyata pengalamannya membuatnya tenang, dan materi yang diberikan menjawab kebutuhan peserta, yang kebanyakan 'tidak berpendidikan tinggi; sebagian besar hanya lulusan SD atau SMP, atau bahkan tidak lulus SD'. Ia bergabung tahun 2014.

Saraiyah mewujudkan komitmen KAPAL Perempuan pada pluralisme. Ketika mengadvokasi perbaikan jalan desa yang curam dan sempit sehingga menyulitkan perempuan mengakses layanan kesehatan ibu dan menghambat ekonomi perkebunan coklat setempat, motivasi Saraiyah sempat dipertanyakan, karena mayoritas warga yang akan mendapatkan manfaat dari jalan tersebut berbeda agama darinya: Ia 'mengatakan kepada kepala dusun bahwa pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan sekelompok kecil orang saja'. Sarannya tersebut kemudian dibawa hingga ke proses perencanaan tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Usulan jalan baru menjadi program prioritas pemerintah.

Setelah gempa bumi pada Juli 2018 memaksa Saraiyah dan teman-temannya di Sekolah Perempuan mengungsi, ia 'memanggil seluruh anggota yang dapat ia hubungi untuk berkoordinasi melakukan apa yang dapat dilakukan'. Ia membantu logistik dan distribusi bantuan; ia menginisiasi dapur umum, serta mengkoordinasi daftar untuk membawa warga yang sakit ke rumah sakit, serta mengumpulkan data pribadi warga yang kehilangan dokumen identitasnya pada saat bencana terjadi. Saraiyah dan rekan-rekannya dari Sekolah Perempuan melakukan sejumlah langkah untuk membangun rasa aman dan nyaman bagi para pengungsi perempuan, khususnya memitigasi risiko pelecehan seksual. Kemudian, mereka bekerja untuk membangun kembali kebun-kebun sayuran organik rumah tangga. Inisiatif ini telah mereka hubungkan dengan program pemerintah daerah.

Sekolah Perempuan mengangkat suara Saraiyah dan membangun pengaruhnya, bekerjasama dengan anggota lainnya. Kepemimpinannya diakui: *'Sebelumnya, suara perempuan tidak didengar, dan kepentingan mereka tidak dianggap serius. Sekarang, jika kami bicara, para laki-laki mendengarkan kami.'* Sekarang, dia menjadi ketua Sekolah Perempuan Lombok Utara. Ia adalah perempuan pertama yang bergabung dalam Majelis Kerama desa, lembaga musyawarah adat setempat. Ia memobilisasi perempuan lain untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang menghadapi ketidakadilan di komunitasnya, dan memperbaiki kondisi bagi semua warga.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Dikompilasi dari *Saraiyah, a Powerful Voice Now Heard*, MAMPU Stories of Change, October 2018, dan *Kesetaraan Jender; Menembus Posisi Setara di 'Berugak'*, 7 Oktober 2018, diakses dari <https://kapalperempuan.org>.

## Laila, dari bersembunyi dari aparat desa hingga menjadi bagian dari pemerintah desa

Pada usia 30 tahun, Laila menjadi salah satu pemimpin perempuan paling berpengaruh di sebuah desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi. Ia menyelesaikan pendidikan formalnya hingga tingkat SD setelah ayahnya wafat untuk membantu keluarga dengan menangkap ikan, kepiting, dan menanam rumput laut. Pada tahun 2014, keponakan Laila mengundangnya ke Sekolah Perempuan:

*Saya ingin bergabung karena saya ingin mencoba, mencoba keluar dari zona nyaman saya. Mungkin ini satu-satunya jalan yang harus saya lalui. Karena dulu, saya tidak berani berbicara, apa lagi kepada pemimpin laki-laki desa. Jika yang kami katakan salah, kami dibentak; Rasanya takut sekal, sangat menakutkan... Sebelum ada Sekolah Perempuan, saya tidak punya keberanian. Jika saya keluar rumah dan saya melihat orang berseragam aparat di dermaga, saya pasti bersembunyi. Saya takut sekali... Saya takut salah.*

Laila kemudian mengikuti kegiatan Sekolah Perempuan tiga kali sebulan: 'sejak itulah keberanian saya bangkit. Bahwa saya memiliki tempat di sini. Saya memiliki hak di sini'. Pada tahun 2015, Laila menjadi Ketua RT setelah ditunjuk oleh kepala desa, dan ia menjadi pemimpin kelompok Sekolah Perempuan yang beranggotakan lebih dari 40 orang.

Laila melihat pengetahuan yang ia peroleh dari Sekolah Perempuan sebagai sebuah tanggung-jawab moral. Ia melihat adanya kebutuhan untuk mengadakan tangki air, toilet umum (MCK), dan akses terhadap listrik. Ketika laki-laki sedang melaut, perempuan harus menghadapi sendiri kekurangan air hingga harus menggunakan air laut jika tidak ada pilihan. Tanpa toilet di rumah, perempuan harus melakukan hajat di pantai saat hari sudah gelap. Tanpa listrik, perempuan kelelahan karena harus melakukan semua pekerjaan saat hari masih terang.

Tahun 2017, Laila mengusulkan pengadaan 25 tangki air untuk pulau tersebut melalui musrenbang desa. Meskipun awalnya hanya dikabulkan 15 buah, tahun berikutnya ia kembali mengadvokasi pengadaan 20 unit lagi. Tiga MCK/ toilet umum juga dibangun. Anggota Sekolah Perempuan secara kolektif melobi pengadaan panel surya, mengusulkan ide ini kepada kepala desa, musrenbang desa, hingga diteruskan secara langsung oleh Laila kepada bupati. Panel surya dipasang di pulau tahun 2017.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Dikompilasi dari transkrip editan dalam Beech Jones B and Hartoto S (eds.) *Kompendium Perjalanan Hidup Aksi Kolektif Perempuan dan Undang-undang Desa di Indonesia / Compendium of Life Histories: Women's Collective Action and the Village Law in Indonesia*. MAMPU / UniMelb, 2020 (forthcoming)

## **Ibu Fathonah - satu dari dua kepala dewan musyawarah desa/pulau di provinsi**

Ibu Fathonah, atau Bu Fat, melihat dirinya sebagai orang biasa, tidak tahu banyak hal dan dengan rutinitas kegiatan mengurus rumah, bertani, dan menjadi 'warga yang baik'. Setelah kemudian bergabung dengan Koperasi Wanita Bunga Bangsa yang didukung PPSW Sumatera, anggota konsorsium PERMAMPU, dia berubah. Ia menjadi aktif di desanya, menyelesaikan pendidikan luar sekolah paket C, dan membentuk koperasi lokal di desanya sendiri dan empat desa lainnya. PPSW mengakui Bu Fat sebagai pemimpin potensial, dan ia pun bergabung dalam program pendidikan pemimpin perempuan potensial PERMAMPU. Bu Fat kemudian mengikuti pemilihan Bkep, setara dengan Badan Permusyawaratan Desa/BPD.

Saat itu, perempuan bahkan tidak berpartisipasi di pemilihan wakil Bkep, kecuali hadir karena menggantikan suaminya. Selain itu terdapat pula pandangan bahwa perempuan, terutama yang tanpa pendidikan universitas, tidak pantas menjadi pemimpin. Bu Fat menyosialisasikan pencalonan dirinya melalui perempuan anggota koperasi yang telah ia bentuk, dengan mendorong mereka agar merekomendasikannya kepada suami mereka. Dia berhasil terpilih di BKep, kemudian ditunjuk menjadi kepala Bkep, satu dari dua pemimpin BKep/BPD perempuan di Provinsi Riau.

Dalam perannya ini Bu Fat berhasil mengadvokasi dana desa agar dialokasikan untuk pendidikan hak seksual dan reproduksi, khususnya bagi perempuan muda. Ia juga bekerja sama dengan puskesmas dan BPJS untuk memfasilitasi akses kepada layanan kesehatan reproduksi.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Keahlian Kampanye Membawa Bu Fat Menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, MSC Story April 2019.



## Pemimpin perempuan akar rumput merespons COVID-19

### **Kepemimpinan Sekolah Perempuan merespon Covid-19 multi-aspek di seluruh Pangkep**

Ketika pemerintah pusat mengumumkan tanggap darurat, para anggota Sekolah Perempuan di Pangkep mendesak pemerintah desa untuk membentuk gugus tugas COVID-19. Gugus tugas ini terdiri dari perwakilan pemerintah desa, pekerja kesehatan, dan Sekolah Perempuan, dan melakukan pengumpulan data warga miskin dan usaha kecil yang terdampak COVID-19. Mereka melakukan desinfeksi fasilitas umum, mendidik masyarakat, dan mengoperasikan pos pemeriksaan (*checkpoint*) di dermaga di setiap pulau untuk mengawasi pergerakan orang.

Para anggota Sekolah Perempuan mendistribusikan makanan bagi warga miskin, serta membuka layanan antar belanja bagi warga yang ingin memesan barang dari pulau utama, sehingga mengurangi biaya angkutan per orang dan pergerakan manusia. Mereka mulai mengadakan layanan tutor untuk mendampingi anak-anak mengerjakan tugas sekolah mereka, sehingga mengurangi beban anggota Sekolah Perempuan yang harus mendampingi anak-anak mereka mengerjakan tugas sekolah. Para tutor mengunjungi rumah para murid atau membantu lewat WhatsApp, dan membantu mengirimkan tugas ke sekolah, sehingga mengurangi biaya kuota internet –biaya yang sulit dipenuhi keluarga. Mereka membantu warga miskin di komunitas mengakses token listrik gratis, setelah meneliti dan menguji ketersediaan fasilitas secara online. 450 rumah tangga di 10 pulau berhasil mengakses listrik gratis.

Mereka membuat dan mendistribusikan lebih dari 500 masker kain kepada warga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas secara gratis. Bersama dengan masker, mereka juga menyebarkan surat yang menjelaskan tentang Covid-19 dan cara mencegah penularan, serta menyertakan nomor kontak anggota Sekolah Perempuan bagi warga yang memiliki pertanyaan. Baru-baru ini mereka memulai diskusi rutin tentang Covid-19 via telepon dan zoom untuk melawan 'berita bohong', dengan menyuguhkan informasi tentang pencegahan penularan, nutrisi penting, serta cara menolong orang yang mengalami KDRT.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Hamdi A. Women's schools in the Pangkajene Islands remain active amid the pandemic. 23 June 2020, diakses di [mampu.or.id](http://mampu.or.id).

## **Kepemimpinan BSA dalam melakukan koordinasi dan menciptakan pendapatan**

Pipit dan sesama anggota Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA) Desa Licin di Jawa Barat telah merasakan dampak Covid-19 pada rutinitas sehari-hari mereka dan perekonomian desa mereka. Karena merasa khawatir dengan banyaknya warga yang kembali ke desa dari daerah lain, mereka mendorong kepala desa membentuk gugus tugas, dan mengumpulkan data tentang distribusi bantuan sosial bagi warga lokal, serta mengelola respon secara lebih baik. Kelompok ini juga telah membuat dan mendistribusikan masker, serta melakukan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Para rekan BSA di desa lainnya, termasuk Surima dari Desa Kartiasa, Kalimantan Barat, melakukan kegiatan serupa. Kelompok ini telah memproduksi dan mendistribusikan sekitar 600 masker kepada komunitas mereka, khususnya bagi penyandang disabilitas, warga lansia, dan warga miskin. Kegiatan ini menarik perhatian pemerintah desa, yang kemudian menugaskan anggota BSA untuk memasok masker ke seluruh keluarga melalui "Proyek 9000 Masker", yang melibatkan perempuan yang kehilangan pendapatan akibat pandemi.<sup>49</sup>

## **Kepemimpinan perempuan dalam promosi kesehatan untuk memerangi COVID-19**

Susilawati adalah anggota Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) yang terhubung dengan anggota jaringan PERMAMPU, yaitu Women's Crisis Centre (WCC) Palembang. Kelompok perempuan melakukan kunjungan rumah ke rumah untuk menyebarluaskan informasi tentang praktik kebersihan dan kesehatan untuk pencegahan Covid dan juga nutrisi umum. Mereka membagikan masker dan pamflet yang telah disiapkan sebelumnya di setiap rumah yang dikunjungi.

Dengan dukungan dari WCC Palembang, Rita secara rutin melaksanakan penyemprotan desinfektan di fasilitas publik di daerahnya bersama para aktivis lainnya. Kelompoknya membangun tempat cuci tangan sederhana yang dilengkapi sabun dan air bersih. Mereka menggunakan desinfektan yang diproduksi secara lokal oleh warga desa sesuai petunjuk pencegahan Covid-19 dari Kementerian Kesehatan. Direktur WCC Palembang menyatakan bahwa 'perempuan memainkan peran sangat penting di garis depan dalam pencegahan Covid-19, tidak hanya di perkotaan, tetapi di pedesaan juga. Semoga pandemi ini akan segera berakhir, kehidupan masyarakat kembali normal, dan warga terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat'.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Hamdi A. BSA is encouraging a gender-sensitive pandemic response cooperation with the village government. 23 Juni 2020, diakses dari [mampu.or.id](http://mampu.or.id).

<sup>50</sup> Hamdi A. The Role of Village Women as Health Promoters Combatting COVID-19. 26 August 2020, diakses dari [mampu.or.id](http://mampu.or.id).



## MAMPU yang aktif mengembangkan kepemimpinan perempuan akar rumput



### 'Aisyiyah

'Aisyiyah didirikan pada tahun 1917 sebagai organisasi perempuan berbasis kepercayaan Islam di bawah Muhammadiyah, satu dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sebagai organisasi perempuan otonom, 'Aisyiyah berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dengan memperkuat partisipasi perempuan di seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Setelah berjalan selama satu abad, 'Aisyiyah memiliki basis keanggotaan yang luas, yang mencapai 10-15 juta perempuan, dengan cabang dan kegiatan di seluruh Indonesia, mendukung pendidikan, kesehatan dan kehidupan perempuan. Dalam kerjanya terkait pengembangan kepemimpinan perempuan akar rumput, 'Aisyiyah berfokus pada pembentukan grup-grup Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA).



### Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia / The Eastern Indonesia Knowledge Exchange Foundation (BaKTI)

Yayasan BaKTI didirikan pada tahun 2009 di Makassar, dan berkembang awalnya sebagai Kantor Pendukung Bank Dunia untuk Indonesia Timur di Makassar. BaKTI mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang program pembangunan dan bantuan yang tersedia untuk pembangunan di Indonesia Timur dan mendukung aktor pembangunan lokal untuk berkolaborasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif yang ada. BaKTI juga menjadi Sekretariat Forum Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di akar rumput, BaKTI mengorganisasi kelompok konstituen yang diajak bersama dalam acara konsultasi publik dengan pemimpin parlemen lokal melalui inisiatif Reses Partisipatif. Di bawah MAMPU, BaKTI bekerja di 85 desa, 6 kabupaten, di 5 provinsi Indonesia Timur.



## **Institut KAPAL Perempuan – Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan / Alternative Education Circle for Women**

KAPAL Perempuan dibentuk pada tahun 2000 untuk memperkuat gerakan perempuan dalam rangka mempercepat terciptanya masyarakat yang memiliki daya pikir kritis, solidaritas, berkeadilan gender, pluralis, transparan dan anti kekerasan. Bekerjasama dengan berbagai organisasi intermediari, KAPAL Perempuan mendirikan Sekolah Perempuan, yang merupakan wadah belajar untuk memberikan pendidikan kritis untuk memperkuat kepemimpinan perempuan akar rumput yang dapat mengadvokasi perubahan di tingkat desa dan kabupaten. Dukungan MAMPU membantu KAPAL Perempuan bekerja di 24 desa di 9 kabupaten/kota, yaitu di DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, serta di NTT dan NTB ini kemudian direplikasi oleh pemerintah daerah menjadi 85 desa dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah kabupaten dan desa



## **Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi/ The Indonesian Women's Coalition for Justice and Democracy (KPI)**

KPI dibentuk pada tahun 1998 untuk mempromosikan kesetaraan gender dan keadilan dan mendukung perkembangan Indonesia yang demokratis dan sejahtera. KPI memiliki sekretariat koordinasi nasional dan sekretariat di lebih dari 110 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. KPI memiliki sekitar 38.000 anggota dan menjangkau sekitar 900 desa di 24 provinsi. KPI memperkuat pengorganisasian masyarakat dan mengembangkan kepemimpinan perempuan melalui pembentukan kelompok-kelompok perempuan yang disebut Balai Perempuan.



## **Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga/ Foundation for the Empowerment of Female Headed Households (PEKKA)**

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana awal Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang ingin mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespon permintaan janda korban konflik di Aceh untuk memperoleh akses sumberdaya ekonomi agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka melalui sebuah proyek yang diberi nama "*widows project*". *Widows project*

ini menjadi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disebut PEKKA agar lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda pada kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga; bukan dilihat dari status perkawinan semata. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu membuat perubahan sosial dan mengangkat martabat janda yang di dalam masyarakat memiliki stigma negatif. PEKKA mulai berkegiatan pada pertengahan tahun 2001 dan Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Kelompok Pekka) pertama terbentuk pada awal tahun 2002 di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2004 dibentuklah Yayasan PEKKA untuk melanjutkan pengorganisasian dan pendampingan pada Kelompok Pekka. Sejalan dengan semakin berkembangnya Kelompok Pekka di berbagai wilayah Indonesia, maka pada tahun 2008 dikembangkanlah Serikat Perempuan Kepala Keluarga atau Serikat Pekka sebagai organisasi berbasis massa yang otonom. Pada tahun 2009 Serikat Pekka dari berbagai wilayah di Indonesia membentuk Federasi Serikat Pekka di tingkat Nasional yang diharapkan menjadi penggerak Gerakan Sosial Perempuan Kepala Keluarga. Sekretariat Federasi Pekka tingkat Nasional mulai aktif pada pertengahan tahun 2018.



## **Konsorsium Perempuan Sumatera MAMPU/ PERMAMPU Consortium**

PERMAMPU adalah konsorsium delapan organisasi perempuan dari seluruh Sumatera. PERMAMPU didirikan pada tahun 2012, dan terdiri dari Flower Aceh (Aceh), Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) (Sumatera Utara), Organisasi Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) (Sumatera Barat), Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Sumatera (PPSW) (Riau), Aliansi Perempuan Merangin (APM) (Jambi), WCC Cahaya Perempuan (Bengkulu), WCC Palembang (Sumatera Selatan), dan DAMAR (Lampung). PERMAMPU bekerja untuk mempengaruhi aktor-aktor strategis, termasuk para tokoh agama dan adat, penyedia layanan kesehatan, dan pemerintah daerah dengan fokus pada hak atas kesehatan seksual dan reproduksi. PERMAMPU telah membentuk jejaring akar rumput yang signifikan yang terdiri dari sekitar 788 kelompok perempuan di 214 desa, di 35 kabupaten di 8 provinsi di Sumatera.



## Referensi

---

- AKATIGA. *Marginalized Groups in PNPM Rural*. Jakarta: PNPM Support Facility, 2010.
- Australian Government. *MAMPU Indonesia: Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan / Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction Program Design Document*. Canberra: DFAT, 2012.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Potensi Desa / Village Potential Statistics of Indonesia 2014*. Jakarta: BPS, 2014.
- Beech Jones B and Hartoto S (eds.) *Kompendium Perjalanan Hidup Aksi Kolektif Perempuan dan Undang-undang Desa di Indonesia / Compendium of Life Histories: Women's Collective Action and the Village Law in Indonesia*. Jakarta: MAMPU / UniMelb, 2020 (forthcoming)
- BITRA, MWPRI, TURC, AYASAMTI, JPRI, SCN-CREST. *Panduan Penguatan Pekerja Rumahan untuk Advokasi Kerja Layak*. Jakarta: MAMPU, 2018.
- Dharmawan L, Pattinasarany G, Hoo L. Participation, transparency and accountability in village law implementation: Baseline Findings from the Sentinel Villages Study October 2015 – February 2016. Jakarta: World Bank, 2018.
- Diprose R, Savirani A, Setiawan K, and Francis N. *Women's Collective Action and the Village Law in Indonesia*. MAMPU / UniMelb, (forthcoming).
- Domingo P, Holmes R, O'Neil T, Jones N, Bird K, Larson A, Presler-Marshall E, and Valters C. *Women's voice and leadership in decision-making: Assessing the evidence*. London: ODI, 2015.
- Ely R, Ibarra H and Kolb D. Taking Gender into Account: Theory and Design for Women's Leadership Development Programs. *INSEAD Special Issue*: Volume 10, Number 3 September 2011.
- Lockley A, Lakshmi T, Satriana S. *Comprehensive, transformative, inclusive, and gender responsive social protection: the experience of MAMPU partners and its relevance to the COVID-19 context*, MAMPU, 2020.
- MAMPU. *Strategic Plan 2017 – 2020*.
- MAMPU. *Response to the COVID-19 Pandemic*, 2020.
- Migunani. *Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia: A study of collective action initiated by partners of the MAMPU program*. Yogyakarta: Migunani and MAMPU, 2017.
- PERMAMPU. *Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera*, 2019.
- PERMAMPU. *'Geliat Perempuan Sumatera' Sebuah Pengalaman Pusat Pendidikan Perempuan Potensial untuk Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput* (The

experience of education for potential women leaders from the grassroots). Draft, 2019.

Syukri M. Gender Equality in Indonesian New Developmental State: The Case of the New Participatory Village Governance. *SMERU Working Paper*. SMERU: Jakarta, 2019. Retrieved from [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).

World Bank. *Indonesian Village Governance under the new Village Law (2015-18): Sentinel Villages Report*. Jakarta: World Bank, 2020.



## Daftar makalah dalam seri ini

---

Britton J. *Civil society advocacy for integration of government poverty reduction efforts and violence against women and children services, MAMPU Innovation Brief*. Jakarta: MAMPU, 2020.

Brown G and Lockley A. *Supporting Women's Movements: Lessons from MAMPU*. Jakarta: MAMPU, 2020.

Lockley A, Lakshmi T, and Satriana S. *Comprehensive, Transformative, Inclusive, and Gender Responsive Social Protection: The experience of MAMPU partners and its relevance to the COVID-19 context*. Jakarta: MAMPU, 2020.

Sciortino S. *Aiming for a Gender-Transformative Universal Health Care Agenda in Indonesia*, draft manuscript.

Piper E and Sirajulmunir N. *Approaches to Women's Economic Empowerment: MAMPU 2014 – 2019*. Jakarta: Solidaritas / MAMPU, 2020

# MAMPU

Australia - Indonesia Partnership  
for Gender Equality  
and Women's Empowerment



[www.mampu.or.id](http://www.mampu.or.id)



[@ProgramMAMPU](mailto:info@mampu.or.id)



[info@mampu.or.id](https://twitter.com/ProgramMAMPU)